



Judul : Sanggah Anggapan Dewan Anti-Demokrasi: Bamsoet Mau Kasih Hadiah ke Pengkritik DPR Terbaik
Tanggal : Kamis, 15 Februari 2018
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Sanggah Anggapan Dewan Anti-Demokrasi **Bamsoet Mau Kasih Hadiah Ke Pengkritik DPR Terbaik**

Hasil revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) ditentang banyak pihak, karena di dalamnya ada aturan yang dianggap bikin DPR tak bisa dikritik. Ketua DPR Bambang Soesatyo menyanggah hal ini.

Dia memastikan bahwa DPR terbuka, bahkan butuh kritik. Dia pun berencana membuat lomba tentang kritik terbaik terhadap DPR.

ATURAN yang dimaksud adalah Pasal 122 huruf k UU MD3. Pasal tersebut memberi wewenang kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hu-

kum terhadap perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan kelembagaan dan anggota DPR. Kemudian ada Pasal 245 yang mengatur bahwa

penganggilan anggota DPR oleh penegak hukum harus mendapat izin Presiden.

Bamsoet mengaku sedih dengan anggapan yang berkembang dalam beberapa hari terakhir. Padahal, dirinya sedang berusaha memperbaiki citra DPR yang selama ini begitu buruk. Untuk menggambarkan rasa sedihnya, dia memilih mengenakan pakaian hitam-hitam saat pidato penutupan masa sidang dalam Rapat Paripurnan DPR, kemarin.

"Saya pakai baju hitam karena

berkabung. Ketika kita membuka diri transparansi pada publik, kita dituding membunuh demokrasi dan antikritik," ucapnya.

Bamsoet lalu menyampaikan judul pidatonya. Judul pidato itu ditampilkan di proyektor ruang Rapat Paripurna. "Pidato saya, saya beri judul 'Kami Butuh Kritik'," ujar Bamsoet sambil menunjuk ke tulisan besar di proyektor.

Karena itu, Bamsoet mempersilakan masyarakat untuk terus mengkritik DPR. Sebab, kritik itu dibutuhkan DPR untuk bekerja lebih baik.

"Justru kita harus menjadikan kritik sebagai vitamin yang dapat menyegarkan kehidupan demokrasi. Karena sejatinya demokrasi adalah bagaimana mengkonvensi berbagai perbedaan dan pandangan menjadi sebuah keputusan," sambungnya.

Di masa kepemimpinannya, Bamsoet ingin terus melakukan pembenahan. Makanya, DPR tak akan menutup mata terhadap kritikan masyarakat. "Dengan semangat untuk terus bebenah, DPR senantiasa memperhatikan aspirasi dan masukan masyarakat. Di era keterbukaan sekarang ini, kita tidak boleh menutup mata atas kritik yang disampaikan masyarakat. Apalagi yang sifatnya membangun."

Setelah pidato, Bamsoet memberi penjelasan lebih lengkap ke wartawan yang mengerumuninya. Dia meminta masyarakat untuk tak terus mengkritik DPR. Masyarakat tak perlu takut. Dia

memastikan, DPR tidak akan memidanakan orang yang mengkritik demi kebaikan. DPR justru akan memberi hadiah kepada orang yang memberikan kritik terbaik.

"Masyarakat tidak perlu khawatir dengan hak imunitas anggota DPR. Itu bukan berarti kami, atau anggota DPR, kebal hukum atau berada di atas hukum. Pimpinan Dewan ingin menegaskan, DPR tidak antikritik. Bahkan, jika perlu DPR akan membuat lomba kritik DPR terbaik," tegasnya.

Lomba kritik ini nantinya akan dinilai dewan juri yang kredibel. Dewan juri terdiri atas akademisi, tokoh masyarakat, dan pemerhati kebijakan publik. Orang yang memberikan kritik terbaik akan diberi hadiah. "Ada hadiahnya, enggak usah khawatir," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga memastikan bahwa masyarakat masih bisa mengkritik DPR. Sebab, Pasal 122 huruf k UU MD3 bukan dimaksudnya untuk menghalangi kritikan publik. Pasal itu hanya terkait dengan penghinaan.

"Nah, mungkin yang terkait di sini adalah yang menyangkut masalah penghinaan atau fitnah. Kalau mengkritik, saya kira enggak ada berubah," kata pentolan Partai Gerindra ini.

Dia pun mempersikan publik mengajukan gugatan peninjauan kembali (*judicial review*) pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia hanya menyampaikan revisi ini telah melalui pembahasan panjang di DPR. ■ ONI/KAL